

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus wacana keislaman terus berkembang, serta menjadi perhatian serius bagi sarjana muslim dan sarjana Barat. Sebagian sarjana mempopulerkan istilah “Islamisme”, sebagai gerakan keagamaan yang berlangsung di tengah masyarakat dengan corak yang politis. Islamisme hadir sebagai alternatif, dengan upaya mengganti sistem politik yang koheren dengan agama, serta mengarahkan masyarakat yang mengalami marginalisasi, terutama di bidang ekonomi, politik dan budaya akibat dari modernitas.<sup>1</sup>

Bassam Tibi memberikan tafsir yang berbeda antara Islam dan Islamisme. Islam didefinisikan sebagai keyakinan, sedangkan Islamisme sebagai politik keagamaan.<sup>2</sup> Kelompok Islamisme mengidolakan Islam, seperti praktik berislam di masa Nabi Muhammad saw., dengan agenda utamanya, yaitu melakukan mobilisasi terhadap pemeluk agama Islam guna menegakkan negara Islam.<sup>3</sup>

Islamisme adalah *umbrella term* bagi para sarjana Islam politik, merujuk pada gejala sosial politik yang sarat dengan nuansa ideologis, dan memperlihatkan diskursus antara agama dan politik. Dalam konteks ini, Islam muncul sebagai ideologi politik dan menjadi dasar berdirinya negara Islam, dan masyarakat

---

<sup>1</sup>Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 12.

<sup>2</sup>Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfatih Adlin (Bandung: Mizan, 2016), h. i.

<sup>3</sup>Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme...*, h. 292.

Muslim yang taat syariah.<sup>4</sup> Menurut Asef Bayat, Islamisme dipahami sebagai ideologi gerakan politik. Gerakannya menghalalkan jalan kekerasan sebagai bentuk perbuatan amar makruf, dan nahi mungkar. Negara Iran adalah contoh konkrit dari gerakan Islamisme yang gagal, akibat masalah internal yang susah untuk diselesaikan. Kemudian, berefek pada perubahan gerakan menjadi pos-Islamisme.<sup>5</sup>

Pos-Islamisme dalam pandangan Bayat, bukan berarti akhir dari Islamisme. Justru, Islamisme dan pos-Islamisme menjadi sebuah teori yang dipakai dalam melihat aspek perubahan, perbedaan yang terjadi masyarakat. Walaupun, dua hal tersebut dapat berjalan secara bersamaan dalam satu masa.<sup>6</sup> Olivier Roy menyebutkan bahwa gerakan Islamisme tidak hilang tetapi mereka berubah (pos-Islamisme). Revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah adalah bentuk revolusi pos-Islamisme, generasi yang muncul tidak lagi peduli dengan “ideologi” mereka, tetapi menginginkan bangkitnya demokrasi. Pos-Islamisme dalam kacamata Roy memiliki ciri-ciri memisahkan agama dan agama sebagai politik, individualisasi agama, pragmatis, kelas muda baru menengah dan terdidik yang kesulitan ekonomi, tetapi memiliki akses pada teknologi komunikasi, seperti internet dan *handphone*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Noorhaidi Hasan (ed), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropsi dan Kontestasi*, (Cet. II; Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), h. 13.

<sup>5</sup>Lihat Asef Bayat, *Islam and Democracy: What is the Real Question?* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007): h. 17-18.

<sup>6</sup>Asef Bayar, *Pos-Islamisme...*, h. 5.

<sup>7</sup>Muhammad Ali, “Islamisme (*al-Islamiyyah*) dan Post-Islamisme (*Ba'da al-Islamiyyah*): Menelaah Pilihan Politik Islam Kontemporer Di Indonesia”, Makalah dipresentasikan di Seminar “Post-Islamisme” di Jurusan Filsafat, Universitas Indonesia, Jakarta, Senin, 14 November 2011. h. 6.

Melihat pos-Islamisme sebagai kondisi, maka Indonesia sebagai negara yang mayoritas menganut agama Islam boleh jadi mengalami gejala tersebut. Noorhaidi Hasan telah mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam pergolakan pos-Islamis, yakni sintesis antara seruan untuk kepentingan Islam bagi kehidupan publik, dan demokrasi. Pos-Islamisme telah muncul menjadi alternatif bagi radikalisme Islam. Agar umat Islam dapat mengekspresikan keyakinan, dan praktik agama mereka, tanpa terjun ke dalam kekerasan, dan bergabung dengan siklus militansi.<sup>8</sup>

Gejala pos-Islamisme di Indonesia, misalnya dapat dilihat dari perubahan Partai Keadilan (PK) dengan ideologi Islamisnya gagal menembus parlemen, setelah itu berubah dengan nama baru, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan setelah itu menjadi partai inklusif. Perkembangan PKS sejauh ini menurut Burhanuddin Muhtadi, dapat dikatakan cenderung menjadi partai pos-Islamisme, dan terlihat menonjol dari gerakan politik partai tersebut.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan Ariel Heryanto, dia menjelaskan bahwa perlu dibedakan antara pos-Islamisme yang “politik”, dan pos-Islamisme yang “kultural”. Pos-Islamisme “politik” yaitu, memiliki hubungan dengan pemerintahan, sebagaimana yang terlihat di Timur Tengah. Sedangkan, pos-Islamisme “kultural” memiliki relasi dengan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Noorhaidi Hasan, “New Horizon of Reading Islam and Politics: Post-Islamism in Indonesia”, *In Right* 4, No. 2 (2015): h. 285.

<sup>9</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h. 177.

<sup>10</sup>Lihat Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), h. 63.

Menyikapi gejala pos-Islamisme “kultural” ini, yang mana unsur Islami terlihat pada produk budaya dan polarisasi pendapat antara komodifikasi melawan Islamisasi. Mereka yang melihat adanya sinkretisme Islam dan budaya populer, yang mana Islam menjadi komoditas, serta menguntungkan kapitalisme.<sup>11</sup>

Bahkan, pos-Islamisme yang berlangsung secara kultural di Indonesia bukan hanya terjadi pada budaya populer, namun bisa berjalan pada semua aspek. Aspek yang dipengaruhi dapat dilihat pada lembaga pendidikan, yang kini berlomba menjual program pendidikan Islami yang membentuk muslim yang taat, dan modern.<sup>12</sup>

Hal ini relevan dengan pendapat Greg Fealy bahwa Islam di Indonesia adalah komoditas pasar atau tempat jualan simbol kesalehan yang dapat membentuk keberagaman masyarakat Muslim.<sup>13</sup> Sedangkan, menurut Muhammad Ansor bahwa studi tentang pos-Islamisme di Indonesia dapat dikaji dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tematis, yaitu dilakukan dengan menghubungkan pos-Islamisme dengan wacana kontemporer tertentu. Selanjutnya adalah pendekatan geografis yaitu, dengan cara menelusuri dinamika pos-Islamisme secara pasti pada ranah lokal atau daerah di Indonesia.<sup>14</sup>

Bagi penulis, mengungkap gejala Islamisme dan pos-Islamisme di Indonesia terutama dalam konteks geografis pada aspek lokal atau daerah, maka salah satu daerah yang penting dipotret adalah Kabupaten Bulukumba yang

---

<sup>11</sup>Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia...*, h. 39.

<sup>12</sup>Lisda Liyanti, “Sekolah Islam Terpadu dan Ruang Negosiasi Identitas Kaum Urban Muslim”, *Prosiding Seminar Nasional Budaya Urban/PPKB FIB UI*, (2017): h. 162.

<sup>13</sup>Lihat Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Ustadz Seleb, Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Kontemporer Indonesia*, terj. Ahmad Muhajir (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), h. 16-17.

<sup>14</sup>Muhammad Ansor, “Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-Reform Indonesia”, *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016): h. 504.

terletak di Sulawesi Selatan. Daerah tersebut, memiliki latar belakang upaya Islamisasi yang cukup dinamis, diawali dengan Islamisasi yang dilakukan oleh Datuk ri Tiro yang menjadi legenda di masyarakat Bulukumba karena jasanya dalam mengislamkan masyarakat Bulukumba, kemudian gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan pasca tumbanganya Soeharto Bulukumba mengalami pergolakan formalisasi syariat Islam melalui peraturan daerah (Perda) di era Patabai Pabokori.

Dinamika itu dapat dilihat dalam tiga hal, yakni *pertama*, Mattulada dalam *Lontara Wajo* menyebutkan bahwa tiga datuk datang ke Sulawesi Selatan di awal abad ke-XVII dari Koto Tengah daerah Minangkabau. Ketiganya membawa misi Islamisasi. Mereka kemudian dikenal dengan gelar *Datuk Tellué* dalam versi bahasa Bugis atau *Datuk Tallua* dalam versi bahasa Makassar, antara lain: Datuk ri Bandang (Gowa-Tallo), Datuk Patimang (Luwu), dan Datuk ri Tiro (Bulukumba).<sup>15</sup>

*Kedua*, masyarakat *Ammatoa*, pernah terlibat perang dengan DI/TII yang dikomandoi oleh Kahar Muzakkar, kemudian dikenal dengan “Gerakan Dompea”. Gerakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Pemberontak DI/TII yang berusaha menghapus kepercayaan dari masyarakat adat Ammatoa di Kajang yang meyakini ajaran “*Patuntung*” dan “*Pasang ri Kajang*” yang dianggap oleh Pemberontak DI/TII sebagai ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Misi utama gerakan Gerilya DI/TII di Bulukumba adalah melakukan pemurnian

---

<sup>15</sup>Lihat Mattulada “Islam di Sulawesi Selatan” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 231.

(penegakan) ajaran Islam dengan cara paksa. Untuk diketahui bahwa masyarakat adat Kajang selama ini teguh mempertahankan adat istiadat atau norma dan sistem sosial yang tertuang dalam “*Pasang*” yang diyakini bersumber dari Tuhan.<sup>16</sup>

*Ketiga*, pasca runtuhnya rezim orde baru tahun 1998. Di Bulukumba terjadi pergolakan lahirnya Perda “Syariat Islam”, yang dimotori oleh KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam).<sup>17</sup> Namun, pada akhirnya peraturan daerah disepakati dengan nama “Crash Program Keagamaan”.<sup>18</sup> Peraturan daerah tersebut menjadi legitimasi yuridis-formal, sebagai penegakan program keagamaan di Bulukumba. Belakangan ini lebih kurang dari satu dekade kehadiran perda keagamaan dianggap mandul, dan tidak laku lagi sebagai jualan politik.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Lihat Abdul Hafid, *Ammatoa: Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang* (Cet. I; Makassar de la macca, 2013), h. 5.

<sup>17</sup>Dalam catatan Mujiburrahman, bahwa di tubuh KPPSI Sulawesi Selatan terjadi perdebatan tentang peraturan yang berbentuk syariah tersebut. Mayoritas anggota bersepakat untuk tidak menggunakan istilah “peraturan syariah” tetapi mencari istilah yang bisa diterima secara umum. Peraturan itu terus mendapatkan dukungan, bahkan muncul usulan menyebutkan aturan itu dengan nama “Perda *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*”. Lihat Mujiburrahman, “Politik Syariah: Perjuangan KPPSI di Sulawesi Selatan” dalam Martin van Bruinessen (Ed.), *Conservative Turn; Islam dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Mizan, 2014), h. 246.

<sup>18</sup>Peraturan daerah ini, antara lain: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 03 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bulukumba. Lihat *Himpunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Bidang Crash Program*, 2004.

<sup>19</sup>Dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2007, Aziz Kahar Muzakkar (Anak Kahar Muzakkar) tampil sebagai calon gubernur berpasangan dengan Mubyl Handaling. Misi utama pemerintahan yang janjikan adalah pemerintahan yang bersih menjadi agenda penting daripada janji pelaksanaan syariah. Bahkan, tiada pernyataan tegas mengenai syariah. Tim kampanye Aziz mungkin menyadari secara politis, syariah tidak begitu *marketable* sebagai jualan politik di Pilkada. Padahal, selama ini Aziz cukup intens dalam menyuarakan syariah Islam di Sulawesi Selatan lewat organisasi KPPSI dan Hidayatullah. Lihat Mujiburrahman, “Politik Syariah: Perjuangan KPPSI di Sulawesi Selatan” dalam Martin van Bruinessen (Ed.), *Conservative Turn; Islam dalam Ancaman Fundamentalisme...*, h. 251.

Lahirnya Perda Syariat Islam di Bulukumba diperjuangkan oleh beberapa organisasi, seperti KPPSI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Mereka terlibat dalam proses yang konstitusional yang diinisiasi oleh Pemda Bulukumba bersama DPRD Kabupaten Bulukumba. Yang diuntungkan dari lahirnya perda ini adalah kelompok Islamis, yang sejak dahulu berusaha melakukan formalisasi syariat Islam dalam konteks bernegara. Pintu masuk perjuangan mereka adalah dibukanya pintu otonomi daerah (desentralisasi). Secara otomatis mereka terlibat dalam proses demokrasi yang selama ini mereka suarkan sebagai produk “sekuler”. Hal ini sejalan dengan narasi pos-Islamisme yang diwacanakan oleh Asef Bayat, yang mengambil jalan untuk kompromi dengan demokrasi. Perubahan gerakan Islamisme di Bulukumba di atas, juga telah mengarah kepada kondisi pos-Islamisme.

Tetapi perlu juga mencermati hasil riset dari CSRC, dan PPIM UIN Jakarta yang menemukan bahwa sikap atau perilaku pemuda Muslim terhadap radikalisme tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang ajek atau tidak berubah. Tetapi dapat dibuat klaim bahwa generasi muda Muslim milenial terdidik bersikap atau memiliki perilaku beragama yang cenderung konservatif dengan corak yang komunal, skriptural, dan puritan.<sup>20</sup> Ada tiga menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada sikap keberagamaan pemuda muslim saat ini, di antaranya adalah, Pengajaran yang disajikan oleh guru dan mentor agama mereka, internet sebagai sumber pengetahuan agama baru, dan upaya pemerintah belakangan ini.

---

<sup>20</sup>Lihat Chalder S. Bamualim, Hilmar Latief dan Irfan Abubakar (Ed), *Kaum Muda Muslim Milenial; Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Cet. I; Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 247.

Menarik bagi peneliti karena Bulukumba menjadi salah satu objek dari penelitian tersebut. Salah satu yang disorot adalah organisasi Wahdah Islamiyah di Bulukumba. Organisasi ini berdiri pada tahun 2002 di Kota Makassar, yang mana embrio organisasi ini berasal dari Yayasan Fathul Muin yang didirikan sejak tahun 1988. Wahdah Islamiyah berhasil mendirikan Sekolah Islam Terpadu, kemudian turut serta meramaikan kontestasi antar lembaga pendidikan di Bulukumba. Sekolah Islam Terpadu<sup>21</sup> dikenal memadukan nilai Islam, dan materi umum dalam kurikulumnya. Namun, biaya pendidikannya mampu menjadi simbol kelas sosial bagi kalangan masyarakat urban muslim di perkotaan.<sup>22</sup> Melalui penyediaan ruang Sekolah Islam Terpadu (SIT), jelas terlihat kesalehan yang ingin dicapai koheren dengan modernitas. Hal ini juga memenuhi aspek *place-identity* yang dimiliki oleh kaum urban muslim, dan menegaskan posisi SIT menjadi wadah ekspresi keberagaman masyarakat urban muslim yang berada pada proyek pos-Islamisme.<sup>23</sup>

Bahkan, integrasi kurikulum SIT dan kurikulum nasional adalah bentuk *Post-Islamism Turn*<sup>24</sup>, yang mana selama ini SIT dilekatkan dengan ideologi Islamisme karena sejak awal terbentuknya dipelopori oleh gerakan Tarbiyah yang

---

<sup>21</sup>Alasan dibalik tumbuhnya SIT sebagai bentuk kekecewaan terhadap Sisdiknas yang sudah lama dirasakan. Namun, kurang memenuhi harapan. Ini juga berkaitan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan di Indonesia dinilai gagal membentuk karakter peserta didik dari ancaman narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan. Dampak modernisasi dan globalisasi mengakibatkan “Kepanikan moral” utamanya pada masyarakat perkotaan. Lihat Noorhaidi Hasan, “Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia”, *Studia Islamika* 19, no. 1 (2012): h. 77.

<sup>22</sup>Lisda Liyanti, “Sekolah Islam Terpadu dan Ruang Negosiasi Identitas Kaum Urban Muslim”...,h. 156.

<sup>23</sup>Lisda Liyanti, “Sekolah Islam Terpadu dan Ruang Negosiasi Identitas Kaum Urban Muslim”...,h. 173.

<sup>24</sup>Moch Nur Ichwan dan Muhammad Wildan (ed.), *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press dan CISForm, 2019), h. 237.



berafiliasi dengan PKS. Menurut Raihani, fenomena menjamurnya SIT pada umumnya menjadikan kelas menengah Muslim perkotaan sebagai target. Serta, praktik komersialisasi pendidikan agama juga dapat dilihat pada SIT.<sup>25</sup> Perjumpaan yang bersinergi antara Islam dengan pilihan dan kebebasan individu serta modernitas, telah menjadi ciri dari gejala pos-Islamisme yang juga dapat dijumpai dalam aktivitas belajar keislaman hari ini.

Dalam ranah budaya populer, di Bulukumba juga munculnya sebuah komunitas yang berorientasi pada minat, dan hobi. Mereka menamakan diri sebagai komunitas Bikers Muslim Bulukumba. Komunitas ini memiliki orientasi agama, yang mana mereka menegosiasikan Islam dengan hobi dari sebagian kawula muda di Bulukumba yang tergabung di komunitas tersebut. Cukup mengejutkan karena mereka kemudian mendadak “hijrah”, dan aktif melakukan kajian (belajar) Islam secara non formal dalam bentuk taklim, dari mesjid ke mesjid sebagai bentuk perubahan sekaligus identitas baru yang dicirikan oleh komunitas bermotor tersebut.

Sedangkan, di kalangan pelajar SMA di Bulukumba, hadir komunitas yang mengatasnamakan diri dengan komunitas jomblo *fi sabilillah* (Jofis), sejatinya ini bentuk gerakan anti pacaran sekaligus identitas “hijrah” yang menjadi tren di kalangan pelajar muslim. Komunitas ini aktif memanfaatkan sosial media untuk belajar keislaman.

Sebagai potensi yang dapat dikembangkan, maka tugas guru adalah berusaha untuk memanfaatkan teknologi dengan maksimal, meminimalisir

---

<sup>25</sup>Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 26.

dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>26</sup> Dampak yang dimaksud adalah internet menjadi komoditi bagi kelompok tertentu untuk menularkan ideologinya, sehingga perlu perhatian serius atau justru kehadiran media sosial dan ruang yang lainnya menghadirkan ruang baru yang menciptakan kesalehan pada pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan konten-konten keislaman yang lebih populer.

Dari uraian di atas, peneliti ingin lebih jauh mengeksplorasi atau menelusuri tentang gejala pos-Islamisme di Kabupaten Bulukumba, yang secara sosio-historis memiliki jejak rekam Islamisme yang kemudian mengalami perubahan menjadi pos-Islamisme. Juga hubungannya dengan pendidikan Islam, yang mana hadir sekolah Islam terpadu yang dimotori oleh organisasi Wahdah Islamiyah. Ruang edar sekolah Islam terpadu ini menysasar kelompok kelas menengah, sebagai bagian dari pos-Islamisme. Sedangkan, pada kelompok pelajar melalui rasa ingin tahunya, dengan mudah untuk mengakses konten-konten keislaman dari ragam sumber sebagai bentuk aktivitas belajarnya baik di sekolah maupun diluar sekolah. Juga mendalami pos-Islamisme kultural, di balik fenomena gerakan hijrah dari komunitas Bikers Muslim Bulukumba.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis berupaya untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dalam penelitian disertasi ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah perkembangan Islamisme menjadi pos-Islamisme di Kabupaten Bulukumba?

---

<sup>26</sup>Lihat kata pengantar Mujiburrahman “Mendidik Generasi Elektronik” dalam Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural...*, h. xiv.

2. Bagaimana pos-Islamisme di lembaga pendidikan Islam swasta dan jaringan dakwahnya di Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana pos-Islamisme dalam budaya populer dan aktivitas belajar keislaman siswa di luar sekolah dan madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penulisan disertasi ini, adalah:

- a. Menjelaskan dan menemukan perkembangan Islamisme dan pos-Islamisme di Kabupaten Bulukumba, sebagai jejak rekam Islamisme menjadi pos-Islamisme di Indonesia.
- b. Menjelaskan dan menemukan pos-Islamisme di lembaga pendidikan Islam swasta dan jaringan dakwahnya di Bulukumba.
- c. Menjelaskan dan menemukan pos-Islamisme dalam budaya populer, dan aktivitas belajar keislaman siswa di luar sekolah dan madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan, signifikansi penelitian yang diharapkan dalam disertasi ini, adalah:

- a. Pada aspek teoritik, disertasi ini berkontribusi dalam memahami kajian gerakan pos-Islamisme utamanya yang bersifat kultural di Indonesia. Dengan melacak corak Islamisme secara geografis, dan pembentukan pos-Islamismenya. Juga sebagai kajian akademis atas pos-Islamisme dalam pendidikan Islam. Penulis berharap agar disertasi ini dapat menjadi sumber

referensi dalam penelitian pos-Islamisme di Indonesia, khususnya bertalian dengan pendekatan sejarah, sosial-politik, dan pendidikan Islam.

- b. Pada aspek praktis, disertasi ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademis, peneliti, guru, praktisi, dan penentu kebijakan pendidikan Islam baik di ranah pesantren, sekolah, dan madrasah dalam perkembangan pendidikan Islam ke depannya.

#### **D. Definisi Operasional**

Pada bagian ini, peneliti merumuskan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan peneliti. Hal ini bertujuan guna memberikan penegasan pengertian atau maksud dari sejumlah istilah yang dipakai. Antara lain, sebagai berikut:

##### **1. Islamisme**

Gerakan Islamisme pada hakikatnya menolak demokrasi, seperti diselenggarakannya pemilihan umum. Sebab, pemilu diyakini mempertuhankan keinginan rakyat ketimbang kehendak Tuhan. Mereka berasumsi bahwa Pemilu sama dengan syirik, yakni percaya serta tunduk pada keinginan manusia. Tetapi di Indonesia, pendukung Islamisme terlibat Pemilu, karena Pemilu merupakan cara sah untuk meraih kekuasaan, dan upaya menegakkan syariat Islam.<sup>27</sup>

Islamisme di Indonesia memiliki banyak varian dan tidak tunggal. Inspirasi gerakan Islamis di Indonesia, paling tidak dipengaruhi oleh ide Islamisme yang berasal dari Timur Tengah, Salafisme Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Pada akhirnya membentuk watak simpatisannya

---

<sup>27</sup>Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2012), h. 90.

menjadi konservatif, fanatik, sektarian, eksklusivis, supremasis, dan anti demokratik.<sup>28</sup> Walaupun dikatakan utopis, namun ideologi Islamisme memiliki daya tarik bagi pendukungnya, karena mampu menawarkan upaya solutif atas *problem* kekinian. Bahkan, Islamisme kini terus mengalami perubahan, dan bergerak dinamis berdasarkan konteks yang melatarinya.<sup>29</sup>

Maksud penulis tentang Islamisme, adalah upaya-upaya Islamisasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu di Bulukumba. Yang mana mereka mengusung ide-ide Islamisme, guna memperjuangkan nilai-nilai substantif ideologi Islam, menerapkan syariat Islam dalam konteks negara maupun lokal, pro terhadap cita-cita pembentukan negara Islam, dan menolak demokrasi yang tidak sejalan dengan Islam. Islamisme menjadi fokus penulis untuk ditelusuri adalah dengan melihat dinamika gerakan Islamisme yang terus bersinambung dan bernegosiasi dengan budaya baru, sejak Islam pertama kali diterima di Bulukumba yang dibawa oleh Datuk ri Tiro hingga kini. Serta perubahan gerakan atau orientasi atas pengaruh situasi yang terus berkembang di Bulukumba.

## **2. Pos-Islamisme**

Pos-Islamisme banyak disuarakan oleh kelompok intelektual agama, kelompok ini banyak menghidupkan pemikiran agama dan praktik demokrasi, dengan menghormati nalar dan menghargai kebebasan, para intelektual agama mendukung orientasi-orientasi umum, mereka tidak lagi menyalahkan

---

<sup>28</sup>AE. Priyono, *Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada, 2019), h. 23-24.

<sup>29</sup>Noorhaidi Hasan (ed), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropsi dan Kontestasi...*, h. 11-15.

permasalahan bangsa kepada kekuatan asing, dan imperialisme barat. Keterbelakangan bangsa bagi mereka diyakini berasal dari dalam diri sendiri, fokus gerakan mereka pada cita-cita pelembagaan kebebasan dan demokrasi di masyarakat.<sup>30</sup>

Terbentuknya pos-Islamisme dapat diidentifikasi melalui proses institusionalisme Islam, yakni dengan keikutsertaan kelompok Islamis dalam organisasi politik, dan ikut pemilu untuk merebut kekuasaan.<sup>31</sup> Sikap ini dipandang sebagai bentuk pos-Islamisme yang bersifat politis. Pos-Islamisme yang penulis maksud dalam riset ini, adalah menelusuri pos-Islamisme yang bersifat politis di Bulukumba. Dengan mengkaji sikap politis beberapa kelompok Islamis dalam memperjuangkan ide-ide syariat Islam pada ranah lokal di Bulukumba. Serta, *political will* pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan daerah yang bernuasa syariat Islam atas dukungan kelompok Islamis, dan masyarakat. Di sisi lain, penulis juga menelusuri aktivis pos-Islamisme yang kontra dengan narasi Islamisme yang diterapkan dalam bentuk perda, dengan alasan diskriminatif terhadap gender, advokasi terhadap kelompok minoritas, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, pos-Islamisme yang penulis maksudkan juga adalah bersifat kultural sebagaimana yang dijelaskan oleh Ariel Heryanto<sup>32</sup>, yaitu keterhubungan Islamis dengan budaya populer yang terjadi dalam kehidupan modern. Sebagai bentuk sinkretisme Islam, dan budaya populer di Bulukumba. Sejalan dengan

---

<sup>30</sup>Asef Bayat, *Pos-Islamisme...*, h. 159.

<sup>31</sup>Bassam Tibi, "Islamisme and Democracy: On the Compatibility of Institutional Islamisme and the Political Culture of Democracy". *Journal of Totalitarian Movements and Political Religions* 10, no. 2 (2009): h. 137.

<sup>32</sup>Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia...*, h. 63.

penjelasan di atas, yang ingin penulis dalami terkait peran Wahdah Islamiyah dalam mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT), merebut aspirasi pendidikan kelas menengah Muslim di Bulukumba, serta pengaruhnya pada sekolah di Bulukumba. Selain itu, kehadiran Bikers Muslim Bulukumba menjadi perhatian utama penulis dalam menjelaskan pos-Islamisme terkait hubungannya budaya populer di Bulukumba. Begitu juga dengan perhatian pelajar terhadap penggunaan teknologi, yang berada dalam pengaruh narasi Islamis, terutama wacana hijrah yang menjadi konsumsi publik terutama pada kalangan pelajar di Bulukumba.

### 3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki aspek kajian yang sangat luas, sehingga penulis perlu memberikan batasan dalam kajian ini. Pendidikan Islam dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni: *Pertama*, tentang aktivitas belajar keislaman. Dalam KBBI, kata aktivitas memiliki arti yaitu keaktifan, kegiatan, dan kerja.<sup>33</sup> Aktivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan keadaan bergerak, eksplorasi, dan berbagai respon lainnya terhadap rangsangan sekitar.<sup>34</sup> Sedangkan, belajar dalam sebagaimana yang didefinisikan oleh Gagne adalah upaya perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan sikap, minat, atau nilai serta perubahannya dalam meningkatkan kemampuan atau kinerja.<sup>35</sup> Aktivitas belajar yang dimaksud peneliti adalah kegiatan atau tindakan dilakukan oleh individu (siswa) untuk menerima pengetahuan, dan pengalaman melalui kegiatan belajar keislaman.

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 23.

<sup>34</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 89.

<sup>35</sup>Kokom Komalasari, *Pembelajaran kontekstual Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2010), h. 2.

Dengan melihat secara mendalam aktivitas siswa dalam belajar keislaman, materi keislaman yang mereka pelajari, dan sumber belajar keislaman mereka peroleh baik di dalam maupun di luar madrasah dan sekolah negeri di Bulukumba.

*Kedua*, menyangkut tentang pendidikan Islam yang berlangsung di lembaga pendidikan Islam baik secara formal, non formal, dan informal di Bulukumba. Kata “lembaga” dalam KBBI memiliki arti, yaitu asal mula, bentuk, acuan, badan.<sup>36</sup> Jika menggunakan bahasa Inggris diucapkan dengan istilah *institute*. Hal ini karena lembaga dipahami dalam pengertian fisik, tetapi apabila yang dimaksud adalah non fisik maka disebut dengan istilah *institution*, atau sebuah aturan untuk memenuhi keperluan manusia.<sup>37</sup> Sedangkan, pendidikan sering dipahami sebagai ikhtiar manusia dalam mendidik kepribadian mereka, yang sejalan dengan sistem nilai yang berlangsung di tengah masyarakat dan budaya mereka. Tidak hanya itu, pendidikan dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, untuk mencapai mentalitas yang lebih baik lagi.<sup>38</sup> Lembaga pendidikan di sini berarti bahwa lembaga sebagai tempat terselenggaranya proses pendidikan, dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan motif untuk mendidik perilaku, dan membina siswa atau individu kepada yang lebih baik, dengan cara berinteraksi dengan lingkungan mereka.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang dikelola secara formal oleh pihak swasta dalam hal ini adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Wahdah Islamiyah

---

<sup>36</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apolo, 1994), h. 127.

<sup>37</sup>Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

<sup>38</sup>Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1.



Kabupaten Bulukumba. Sangat penting bagi peneliti untuk mendalami pengaruh Wahdah Islamiyah Bulukumba, sebagai organisasi keagamaan yang mampu mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) di ranah lokal, dengan melihat aspek jaringan (*network*) pendidikan, kurikulum, dan kontestasinya terhadap lembaga pendidikan di sekitarnya. Begitu juga dengan kemampuannya bernegosiasi dengan pihak masyarakat sebagai pengguna/konsumen, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya di daerah.

Selanjutnya adalah lembaga pendidikan non formal yang bersifat ekstra kurikuler keagamaan di lingkungan sekolah dan madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba. Lembaga tersebut meliputi, organisasi Rohis Nurul Tarbiyah SMAN 1 Bulukumba, Rohis SMAN 8 Model Bulukumba, dan Rohis Miftahul Ulum MAN 2 Bulukumba. Yang dipotret terhadap lembaga ini terkait tentang kajian keislaman pada ketiga lembaga tersebut. Juga pengaruh jaringan dakwah Wahdah Islamiyah melalui organisasi HILMI Bulukumba, yang bekerjasama dengan Rohis di SMAN dan MAN di Bulukumba. Pada akhirnya berdampak pada aktivitas belajar keislaman siswa pada lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan Islam non formal, dibatasi pada kegiatan belajar agama Islam di lingkungan sekolah.

Yang terakhir adalah lembaga pendidikan Islam informal. Bentuk pendidikan informal tidak hanya terjadi di lingkup keluarga semata, tapi juga berlangsung di tengah masyarakat. Saluran pendidikan Islam informal yang berlangsung di masyarakat, dalam meliputi kegiatan pendidikan Islam yang berlangsung di mesjid, sebagai tempat berlangsungnya kajian keislaman, tarbiyah, taklim, tabligh akbar.

Juga berkaitan dengan dakwah terutama dakwah digital yang belakangan ini populer diberbagai kalangan, yang mudah dijumpai di media sosial sebagai sarana belajar agama Islam secara mandiri. Dalam aspek ini juga menghubungkan antara pendidikan Islam dengan budaya populer, yang diekspresikan oleh anak-anak muda dari sebuah komunitas berbasis minat dan hobi, seperti komunitas Bikers Muslim Bulukumba, dan pemanfaatan media sosial sebagai sumber belajar sebagaimana halnya yang juga terjadi pada komunitas *Jomblo fi Sabilillah* (Jofis), serta kegiatan belajar siswa di luar sekolah di Kabupaten Bulukumba.

#### **4. Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba<sup>39</sup> resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan lambang daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960, dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. Bulukumba memiliki jarak sekitar 153 Km dari kota Makassar. Letaknya berada di wilayah Selatan Propinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki luas wilayah sekitar 1.154,67 Km<sup>2</sup>. Daerah ini juga memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Gantarang, Rilau Ale, Bulukumpa, Bontotiro, Ujung Loe, Herlang Bontobahari, Kajang, dan Kindang. Yang terbagi ke dalam 136 desa/kelurahan atau masing-masing 109 desa dan 27 kelurahan.

Bulukumba memiliki slogan, yaitu "*Mali' siparappe, tallang sipahua*" (Jika hanyut sama-sama terdampar, jika tenggelam sama-sama terapung). Bahasa tersebut mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis-Makassar. Juga sebagai gambaran sikap masyarakat Bulukumba dalam mengembang amanat

---

<sup>39</sup>Profil Kabupaten Bulukumba Tahun 2016.

persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama, demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spritual, dunia, dan akhirat.

Dari aspek budaya, Bulukumba memiliki komunitas adat *Ammatoa* Kajang. Masyarakat Kajang ialah komunitas adat yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, perahu Pinisi Bulukumba yang dikenal dunia, telah menjadi warisan budaya dunia oleh *United Nations Education, Scientific, Cultural Organization* (UNESCO), dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba. sedangkan, kondisi umat beragama di daerah ini, yaitu penganut agama Islam berjumlah sekitar 417.817 orang, Protestan dianut oleh 303 orang, Katolik dianut oleh 74 orang, Hindu dianut oleh 51 orang dan Budha dianut oleh 81 orang.<sup>40</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Di bagian ini penulis menyajikan hasil penelusuran pada penelitian terdahulu yang berupa karya-karya kesarjanaan dari buku atau referensi, jurnal nasional dan internasional serta hasil riset lainnya yang telah dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun online. Penelitian terdahulu diperlukan, agar penelitian ini lebih aktual.

Diskursus Islam politik (*Islamisme*) dalam wacana global disinyalir telah mengalami bentuk transformasi gerakan baik secara teoritis, dan aplikatif ke arah yang lebih fleksibel, dan terbuka mengikuti arus modernisme. Apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? selama ini menjadi bahan pertanyaan dalam tren diskursus bagi kalangan sarjana barat maupun sarjana muslim. Pada

---

<sup>40</sup>Sumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dalam Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2019, (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba, 2019), h. 91.

kenyataannya, Islam sejalan dengan praktik demokrasi yang berlangsung dewasa ini, sebab Islam bukanlah ajaran yang rigit (kaku) dalam mengikuti perkembangan zaman.

Gerakan Islamisme menjadi pos-Islamisme adalah salah satu dari bagian wacana global yang menarik untuk dikaji. Secara teoritis kajian ini pertama kali dilakukan oleh Asef Bayat ia merupakan Profesor Sosiologi di Illionis University kelahiran Iran. Pos-Islamisme kata Bayat, telah diperkenalkan pada tahun 1996 melalui sebuah esai pendek dengan judul “*The Coming of a Post-Islamist Society*”. Definisi pos-Islamisme menurut Asef Bayat, bahwa pos-Islamisme bukan anti-Islam, tetapi lebih mencerminkan kecenderungan pada sekularisasi agama. Terutama, ditandai dengan seruan untuk membatasi peran politik agama.<sup>41</sup>

Pada tahun 2005, Bayat menulis tentang “*What Is Post Islamism?*” mengulas dengan lebih mendalam tren pos-Islamisme dengan menerangkan bahwa tren ini mulai berkembang di beberapa negara selain Iran seperti Tunisia, Mesir, dan Turki.<sup>42</sup> Kemudian Pada tahun 2007, Asef Bayat menulis “*Making Islam Democratic: Social Movement and Post-Islamist Turn.*” Buku ini memberikan gambaran bahwa pos-Islamisme merupakan fase kegamangan umat Muslim di Timur Tengah terhadap wacana revolusi Islam. Pos-Islamisme dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk manifesto politik dalam mengganti wajah Islam untuk sejalan dengan sistem demokrasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Lihat Asef Bayat, “*The Coming of a Post-Islamist Society*”, (*Critique* Fall, 1996): h. 45-46.

<sup>42</sup>Asef Bayat, *What Is Post-Islamism?*. ISIM Review 16: 5 (2005): h. 43-52.

<sup>43</sup>Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LKis, 2011).

Setelah itu ia juga kemudian menulis buku dengan topik tentang “*Post-Islamism The Changing Faces of Political Islam*”. Buku ini terdiri dari beberapa penulis, seperti Asef Bayat, Ihsan Dagi, Cihan Tugal, Sami Zemni, Noorhaidi Hasan, Joseph Alagha, Humeira Iqtidar, Stephane Lacroix, Abdelwahab El-Affendi dan Thomas Pierret.<sup>44</sup> Buku ini menguraikan tentang ide-ide pos-Islamisme yang telah menjalar ke negara-negara mayoritas berpenduduk Islam di dunia dengan berbagai macam bentuk atau karakter dari masing-masing negara, termasuk di Indonesia.

Muhammad Atiullah Ohtman, Zuraini binti Jamil, Osman & Siti Noranizahafizah Boyman dalam jurnal penelitiannya *Political Islam in Islamism and Post Islamism: A Study on Islamic Renaissance Front (IRF)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran sekuler dan liberal ditemukan dalam pos-Islamisme yang merupakan esensi yang sama dalam kritik Islamisme. Selain itu, artikel ini menyelesaikan kebingungan dalam wacana politik Islam terutama di dalam sekularisme, liberalisme dan masalah demokrasi. Pos-Islamisme juga menggunakan model politik Turki sebagai argumen agunan. Namun, para peneliti seperti Sengupta telah menemukan bahwa model politik Turki membawa sekularisme dan liberalisme juga. Oleh karena itu, model politik Turki sebenarnya adalah konsep politik sekuler. Selain itu, ada panggilan IRF yang jelas untuk Islamis untuk mengubah Islamisme ke pendekatan pos-Islamisme dan menjadi sekuler atau liberal.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Asef Bayat (Ed), *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (New York: Oxford University Press, 2013).

<sup>45</sup>Muhammad Atiullah Ohtman, Zuraini binti Jamil, Osman & Siti Noranizahafizah Boyman, “Political Islam in Islamism and Post Islamism: A Study on Islamic Renaissance Front

Selain itu, riset tentang pos-Islamisme di Indonesia ditulis oleh beberapa peneliti di antaranya, adalah Noorhaidi Hasan yang menulis artikel tentang “*New Horizon of Reading Islam and Politics: Post-Islamism in Indonesia*”.<sup>46</sup> Dalam artikel ini diulas bahwa pasca Orde Baru di Indonesia, telah hadir tren baru dalam konteks wacana, tindakan dan gerakan yang berupaya mendorong Islam ke tengah. Dengan strategi menerapkan syariah dari bawah, mempromosikan dakwah Islam tanpa kekerasan dianggap lebih tepat untuk menghadapi situasi saat ini. Alasan ini meyakini bahwa Indonesia dalam pergolakan pos-Islamisme. Pos-Islamisme telah membentuk umat Islam untuk mengekspresikan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, tanpa terjun ke dalam kekerasan dan bergabung dalam siklus militansi. Contoh konkrit dalam panggung politik Indonesia, adalah PKS (Partai Keadilan Sosial) yang pertama kali mengikuti pemilu dengan nama Partai Keadilan (PK) berideologi Islamis, kini telah menjadi partai terbuka. Keputusan PKS untuk menekankan kepentingan nasional, dan dialog dalam visi politiknya telah mencerminkan elemen-elemen penting dalam sebuah partai pos-Islamisme.

Dalam artikel lain, Noorhaidi juga menjelaskan tentang “*Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia*”, bahwa Zikir Akbar mengalami perubahan peran, tidak hanya menjadi bagian dari ritual Islam khas Indonesia saja. Tetapi kini juga telah dimanfaatkan sebagai panggung politik. Melalui cara ini, semua kepentingan bertemu termasuk kepentingan politik dengan cara memobilisasi umat Muslim untuk hadir dengan membacakan Zikir guna

---

(IRF)”, *International Journal of Academic Research in Businas & Social Sciences* 8, no. 1 (2018); h. 687-704.

<sup>46</sup>Noorhaidi Hasan, “New Horizon of Reading Islam and Politics: Post-Islamism in Indonesia”, *In Right* 4, no. 2 (2015): h. 285.

menguatkan iman di ruang terbuka, dan menjadi perhatian masyarakat luas. Fenomena ini juga disebut sebagai wujud kesalehan baru yang muncul di era reformasi, yang mana jaringan politik, sosial, dan ekonomi juga bisa saling berjumpa.<sup>47</sup>

Lain halnya dengan Muhammad Anshor yang mengulas tentang “*Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-reform Indonesia*”. Dia mengeksplorasi tentang masalah pos-Islamisme di Indonesia dan pembentukan kembali ruang publik Islam. Ruang publik menjadi panggung kontestasi antara kelompok sekuler, Islamis bahkan sesama organisasi yang meyakini Islam sebagai sumber legitimasi. Dalam artikel ini, dijelaskan tentang gerakan intelektual muslim, aktivisme perempuan pos-Islamisme, gerakan kesalehan, visibilitas Islam dalam lingkup budaya populer dan perdebatan tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Penulis berargumen bahwa dinamika pos-Islamisme di negara Indonesia berkontribusi pada praktik demokrasi setelah reformasi. Serta, perhatian publik dapat teralihkan dari gerakan radikalisme dan bentuk-bentuk kekerasan yang mengataskan agama.<sup>48</sup>

Pergeseran aktivisme keislaman di Indonesia dari Islamis menjadi pos-Islamisme perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Peter Mandaville bahwa cara lain untuk berpikir tentang pasca Islamisme adalah menyamakan tren ini dengan transformasi dalam cara orang Muslim berpikir tentang aktivisme sosial yang diilhami secara religius, dan bergeser dalam bagaimana dan di mana mereka

---

<sup>47</sup>Noorhaidi Hasan, “Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikir Akbar in Indonesia”, *Al-Jamiah* 50, no. 20 (2012); h. 369-390.

<sup>48</sup>Muhammad Anshor, “Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-reform Indonesia”, *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016); h. 471-515.

melakukan kegiatan tersebut. Pos-Islamisme yang ada dalam pikiran kita, bukanlah salah satu yang menggambarkan runtuhnya upaya untuk membangun tatanan sosial Islam.<sup>49</sup>

Ariel Heryanto menulis tentang “*Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*”.<sup>50</sup> Dikatakan bahwa kelas menengah perkotaan di Indonesia, berusaha untuk menata ulang identitas mereka pada saat ini. Masa ini ditandai dengan beberapa hal, seperti meningkatnya politik yang islami yang sebelumnya tidak begitu populer, perdebatan masalah hak asasi manusia pada ruang publik, konflik yang cukup panjang bahkan tidak terdamaikan pada kalangan elit politik, bangkitnya kekuatan ekonomi bagian Asia, dan revolusi di era digital yang sangat menggairahkan kaum muda di dunia.

Selain itu, sebuah buku dengan judul “Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer”, buku ini merupakan kumpulan hasil riset dari sebuah proyek “*call of paper*” yang dilakukan oleh Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara umum, buku ini mengkaji tentang eksistensi Islamisme dan Pos-Islamisme di Indonesia pasca Orde Baru.<sup>51</sup> Referensi tersebut, sangat berguna bagi peneliti sebagai sebuah rujukan sekunder sebagai bahan analisis tentang topik riset penulis.

---

<sup>49</sup>Peter Mandaville, *Islam and Politics* (New York: Routledge, 2014), h. 376.

<sup>50</sup>Lihat Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015).

<sup>51</sup>Moch Nur Ichwan dan Muhammad Wildan (ed.), *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press dan CISForm, 2019).



Bukan hanya itu saja, hasil riset tentang “Peta Literatur Keislaman Generasi Milenial: Ideologi dan Jaringan” juga cukup penting. Dalam riset ini, ditemukan lima corak literatur Islamis yang beredar pada kalangan anak muda Muslim, di antaranya adalah literatur jihadi, tahriri, salafi, tarbawi dan Islamisme populer. Literatur ini diperoleh dari tokoh-tokoh buku, kegiatan Rohis, LDK, pengajian dan kegiatan bedah buku.<sup>52</sup> Riset yang lain juga ditemukan bahwa sikap dan perilaku pemuda Muslim terhadap radikalisme tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang tetap. Tetapi dapat dibuat klaim bahwa generasi muda Muslim milenial terdidik cenderung menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang cenderung konservatif, dengan coraknya yang komunal, skriptural, dan puritan.<sup>53</sup>

Merujuk dari beberapa penelitian terdahulu dan literatur di atas dapat diklaim oleh penulis bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan sebagaimana yang penulis telah uraikan. Pos-Islamisme di Indonesia selama ini hanya dikaji dalam konteks wacana, gerakan politik Islam dan budaya populer secara umum di Indonesia. Dalam hemat penulis, kajian tentang pos-Islamisme di ranah lokal di Indonesia belum banyak. Di sisi lain, peneliti juga menghubungkannya dengan praktik pendidikan Islam saat ini, sebagai bagian dari konsentrasi penulis dalam studi.

Secara substansif, penelitian terdahulu di atas sangat bermanfaat guna mempertajam analisis terhadap fokus masalah dalam penelitian ini. Sehingga

---

<sup>52</sup>Convey Report, *Peta Literatur Keislaman Generasi Milenial: Ideologi dan Jaringan*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).

<sup>53</sup>Lihat Chalder S. Bamualim, Hilmar Latief dan Irfan Abubakar (Ed), *Kaum Muda Muslim Milenial; Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Cet. I; Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

peneliti sangat berharap agar hasil riset ini mampu memberikan data yang sifatnya aktual atau baru berdasarkan *setting* penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.<sup>54</sup> Di bagian ini akan dijabarkan hal-hal yang bersifat metodologis sebagai gambaran umum pada penelitian ini. Antara lain, yaitu: 1) pendekatan dan jenis penelitian; 2) lokasi penelitian; 3) data dan sumber data; 4) prosedur pengumpulan data; 5) analisis data; dan 6) pengecekan keabsahan data. Dari masing-masing komponen metode penelitian di atas, diuraikan penulis antara lain sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dapat dipahami sebagai usaha dalam kegiatan penelitian untuk menghubungkan dengan objek yang akan diteliti.<sup>55</sup> Dalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan keilmuan yang relevan secara terpadu, untuk mengkaji pos-Islamisme dalam Pendidikan Islam di Kabupaten Bulukumba.

Pendekatan yang dipakai pada riset ini, yaitu: *pertama*, pendekatan historis. Pendekatan kesejarahan sangat diperlukan dalam menjelaskan perkembangan Islam, karena agama hadir dalam keadaan yang nyata atau terkait pada situasi sosial di tengah masyarakat. Pemakaian data sejarah akan memudahkan penulis untuk menyajikan informasi secara gamblang dari situasi

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 3.

<sup>55</sup>Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66.

yang terjadi khususnya tentang perkembangan Islam.<sup>56</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha menelusuri secara mendalam proses Islamisasi yang dilakukan oleh Datuk ri Tiro di Bulukumba sampai dengan lahirnya perdatan Islam, dan perubahan gerakan Islamisme menjadi pos-Islamisme di Bulukumba dengan menggunakan teori kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Terkait dengan teori ini, peneliti mengadopsi tiga pendekatan yang digunakan oleh Jhon Obert Voll dalam mengkaji dunia Islam, yakni: 1) kelompok revivalis dan kondisi lokal mereka tumbuh, 2) relasi varian pergerakan Islam, 3) Islam itu sendiri.<sup>57</sup> Namun, tetap melakukan modifikasi sesuai dengan setting dalam riset ini, juga menggunakan teori-teori yang relevan dalam menjelaskan dan menemukan kesinambungan dan perubahan dalam fokus kajian dalam disertasi ini.

*Kedua*, pendekatan fenomenologis. Menurut Maurice Natanson bahwa fenomenologi bisa dipakai guna mengacu pada ilmu sosial yang menjadikan kesadaran manusia, dan makna subjektif sebagai cara dalam mengetahui tindakan sosial.<sup>58</sup> Peneliti menginginkan pemaknaan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku atau aktor dalam fokus kajian ini. Di sisi lain, fenomenologi digunakan sebagai usaha memahami realitas sebagaimana adanya, dan peneliti harus menghindari prasangka sebelum memahaminya. Mujiburrahman menggambarkan tentang pendekatan fenomenologis yang berhubungan dengan fenomena

---

<sup>56</sup>Lihat Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105.

<sup>57</sup>Lihat John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 1-4.

<sup>58</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. 9; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 20-21.

keagamaan, bahwa sepatutnya agama juga dilihat dari kacamata agama itu sendiri, atau berasal dari sudut pandang dari penganut agama tersebut. Berbeda halnya dengan Freud yang mereduksi fenomena keagamaan sebagai fakta sosial psikologis saja. Tetapi, bagi Durkheim, Weber, dan Marx hanya sebagai fakta sosial belaka.<sup>59</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis pada penelitian ini, adalah membantu penulis dalam mengumpulkan data awal untuk memahami realitas yang terjadi di lapangan, dan menghindari prasangka sebelum memahami konteks. Setelah itu, peneliti mencari makna dari deskripsi atau ungkapan-ungkapan dari aktor/informan.

*Ketiga*, pendekatan sosiologis. Jika dihubungkan dengan studi agama, maka pendekatan ini fokus terhadap interaksi agama dan masyarakat. Dengan melihat struktur sosial, pengalaman manusia, dan budayanya. Sosiologi juga harus memandang peristiwa-peristiwa sosial “sebagai sesuatu” yang perlu dijelaskan. Langkah lain juga bisa dilakukan untuk lebih memahami, yaitu berusaha memahami subjektivitas individu secara internal dengan memposisikan diri kita pada posisi individu tersebut. Menurut Max Weber bahwa sosiologi berangkat dari prinsip bahwa yang menjadi materi dasar kehidupan sosial adalah tindakan para individu. Kita hanya bisa memahami mereka jika mengakui bahwa orang-orang itu melakukan tindakan tersebut.<sup>60</sup> Dengan kata lain bahwa peneliti menggunakan teori-teori sosiologis dalam mengolah, menggambarkan, dan

---

<sup>59</sup>Lihat Mujiburrahman, “Fenomenologi Niat Antara al-Gazali dan al-Sayuthi” *KANZ PHILOSOPHIA* Vol. 1 No. 2 (2011): h. 215-226.

<sup>60</sup>Anthony Giddens, Daniel Bell, Michael Force, etc. *Sosiologi; Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terj. Ninik Rochani Sjams (Cet. IV; Bantul, 2009), h. xvi.

memaparkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan baik serta pengaruhnya dengan fenomena lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada prosedur riset untuk memperoleh data deskriptif berupa pernyataan yang tertulis dan lisan dari seseorang, dan perilaku yang dapat diamati.<sup>61</sup> Sedangkan, menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif naturalistik terhadap subjek kajiannya.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggabungkan penelitian kepustakaan<sup>63</sup>, dan penelitian lapangan. Sehingga menuntut peneliti untuk terjun secara langsung ke perpustakaan, dan lokasi penelitian dengan tujuan mengambil data lapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi, difokuskan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang dikelola oleh Wahdah Islamiyah Bulukumba, organisasi Rohis Nurul Tarbiyah SMAN 1 Bulukumba, Rohis SMAN 8 Model Bulukumba, dan Rohis Miftahul Ulum MAN 2 Bulukumba. Juga pada komunitas, seperti Bikers Muslim Bulukumba, dan Jomblo *fi Sabilillah*. Serta yang penulis anggap relevan dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>61</sup>J. Taylor dan Steven Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning* (New York: John Wiley dan Son Inc, 1984), h. 5.

<sup>62</sup>Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.

<sup>63</sup>Menurut Creswell, studi kepustakaan dipakai untuk kepentingan membatasi masalah penelitian, menarasikan ulang sejumlah literatur, dan usaha untuk mengkomparasikan hasil temuan penelitian. Lihat, John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications. Inc., 2009), h. 27.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi tentang suatu hal yang dapat diketahui, atau fakta yang dijelaskan dengan berbagai hal dalam bentuk angka, simbol, kode, dan lainnya. Sedangkan, sumber data adalah informasi dari subjek dalam sebuah penelitian.<sup>64</sup> Misalnya, data dalam bentuk lisan dan tulisan yang diperoleh dari informan yang penulis jadikan sebagai sumber informasi. Tentu data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan fokus masalah yang sedang diteliti.

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan data yang peneliti peroleh dari orang-orang secara langsung. Sedangkan, sumber sekunder adalah data yang bersifat secara tidak langsung peneliti peroleh, seperti orang lain dan dokumen tertentu. Adapun penjabaran dari kedua sumber data tersebut, di antaranya: *pertama*, data primer, adalah data utama yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan melalui informan. Adapun informan yang peneliti maksud adalah kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan lain-lain yang bermukim di Kabupaten Bulukumba. *Kedua* adalah data sekunder, yaitu berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi data utama apabila diperlukan. Hal ini berguna dalam menghindari munculnya data yang kurang valid yang diperoleh dari suatu penelitian dan menguatkan hasil temuan di lapangan.

Sumber data pada penelitian ini adalah kombinasi dari dua sumber, yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Penulis kemudian petakan ke dalam 2 bagian. *Pertama*, data yang diperoleh dalam kepustakaan dilakukan dengan

---

<sup>64</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

menganalisis secara mendalam beberapa referensi atau buku yang relevan, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu dan sejenisnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini, yakni pos-Islamisme yang kemudian dihubungkan dengan Pendidikan Islam. Data kepustakaan, sangat penting bagi peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan dengan Islam masuk di Bulukumba, gerakan DI/TII, Perda Syariat Islam di Bulukumba, dan data lainnya yang relevan.

Dan *kedua*, adalah data lapangan, pengambilan data ini difokuskan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Wahdah Islamiyah Bulukumba, Rohis Nurul Tarbiyah SMAN 1 Bulukumba, Rohis SMAN 8 Model Bulukumba, dan Rohis Miftahul Ulum MAN 2 Bulukumba. Serta, komunitas Bikers Muslim Bulukumba, dan *Jomblo fi Sabilillah*.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Data**

Di bagian ini peneliti berusaha untuk memperoleh data melalui informasi yang lebih terpercaya, dan asli berdasarkan pada fokus masalah penelitian ini. Dalam kegiatan mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa cara, yakni:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode yang sangat penting untuk menggali, melihat, mengamati, dan mendapatkan informasi data sesuai dengan yang peneliti lakukan. Sebab dengan metode ini diperoleh data tentang masa lampau, masa kini, maupun masa depan.<sup>65</sup> Peneliti juga berusaha untuk melibatkan diri dalam aktivitas dari informan/narasumber. Teknik ini sangat efisien untuk mengetahui secara

---

<sup>65</sup>Sanapiah Faisal, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 61-62.

mendalam aktivitas belajar informan. Hal ini sejalan dengan pendekatan (fenomenologis) yang dipakai dalam riset ini guna mendapatkan makna dari informan.

b. Wawancara mendalam

Metode wawancara secara teknis berbentuk pertanyaan yang disodorkan oleh peneliti dengan cara lisan kepada informan. Ciri utamanya adalah terjadinya kegiatan bertatap muka antara peneliti dan sumber data atau dalam hal ini informan.<sup>66</sup> Dalam kegiatan wawancara, penulis bisa menggali secara mendalam tentang apa yang diketahui, dipahami atau dilakukan oleh informan utamanya yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

Dalam mengumpulkan data penelitian, digunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* sebagai teknik dalam menentukan informan. *Purposive sampling* adalah sebagian cara mengambil data, karena informan tersebut diyakini peneliti mengetahui masalah penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan, *snowball sampling*, yaitu teknik memilih informan dengan cara berantai, seperti bola salju yang berguling-guling kemudian menjadi besar, dengan maksud akan memperoleh informasi yang lebih banyak.<sup>67</sup>

Jika menggunakan *purposive sampling*, maka informannya tetap berpedoman kepada sumber informan dari data primer (pokok) yang sebelumnya peneliti uraikan di atas. Sedangkan, penggunaan teknik *snowball sampling*. Peneliti bisa saja menemui kendala tentang kalangan pelajar yang akan diteliti, dengan tehnik ini sangat berguna. Melalui rekomendasi dari siswa/pelajar, peneliti

---

<sup>66</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.

<sup>67</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2007), h. 49.



dalam mengetahui siapa-siapa saja informan dari kalangan pelajar yang bisa menjadi informan dalam penelitian ini.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung terhadap sebuah penelitian. Cara ini diterapkan untuk mengambil data, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi tidaklah sulit, karena jika terjadi kekeliruan dalam sumber data masih tetap atau tidak berubah.<sup>68</sup> Dokumentasi yang dimaksudkan oleh peneliti berguna untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara, yakni dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah menelaah secara gamblang hasil pengumpulan data, untuk memahami penelitian tersebut. Analisis data urgen dilakukan dengan berusaha mencari sebuah makna dibalik sebuah informasi,<sup>69</sup> Pada penelitian ini digunakan analisis data yang dirancang oleh Miles and Huberman<sup>70</sup>, yang di dalamnya ada tiga tahapan, yakni pertama-tama dilakukan reduksi data, setelah itu penyajian data, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. *Pertama*, reduksi data. Dilakukan secara kontinu selama penelitian berjalan. Peneliti mengumpulkan semua data penelitian. Selanjutnya adalah data disederhanakan dan ditampilkan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk uraian data. Dengan

---

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik...*, h. 206.

<sup>69</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104.

<sup>70</sup>Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods*, (London: Sage Publication, 1984), h. 21-23.

cara tersebut maka diperoleh simpulan yang bersifat sementara sebagai temuan dalam penelitian itu.

Tahapan *kedua* adalah penyajian data hasil penelitian. Data disajikan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan generalisasi data yang sebelumnya telah melalui tahap reduksi data. Peneliti melakukan ini, untuk menemukan data yang akurat, obyektif, valid dan berkualitas. Tahapan *ketiga*, atau bagian akhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Di bagian ini, peneliti melakukan interpretasi data dan menentukan makna dari data yang sebelumnya telah disajikan. Kesimpulan akhir sangat penting sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan proses panjang sebagai langkah-langkah dalam penelitian.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan validitas data penelitian, peneliti melakukan sinkronisasi data penelitian dari berbagai sumber, terutama hasil wawancara, data observasi, maupun dokumen pendukung. Teknik ini kemudian dikenal sebagai strategi ganda dalam penelitian karena menggunakan cara yang beragam dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, digunakan teknik mengecek keabsahan data, yaitu:

- a. Triangulasi data. Cara ini diterapkan untuk mengecek validitas data dengan mengkonfirmasi data yang ditemukan dilihat dari aspek sumbernya, metodenya, dan waktu penelitian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Lihat Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 117.

<sup>72</sup>Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

- b. Perpanjangan pengamatan, teknik ini dilakukan oleh peneliti jika masih ada data yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Serta sangat berguna, jika diketahui ada data baru yang sangat urgen untuk menyempurnakan hasil penelitian awal yang telah ada.
- c. Diskusi dengan rekan sejawat atau kolega. Usaha ini dilaksanakan peneliti untuk memperoleh respons berupa tanggapan kritis, maupun pandangan baru atas hasil kesimpulan sementara dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam disertasi ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab diuraikan ke dalam beberapa sub bab, adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi tentang tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan kajian teori disertasi ini, yang terdiri dalam 3 sub pembahasan. *Pertama*, Islam politik dan Islamisme dalam teori kesinambungan dan perubahan. *Kedua*, pos-Islamisme dan pengaruhnya di Indonesia. *Ketiga*, pendidikan Islam dalam konteks aktivitas belajar, materi pembelajaran, dan sumber belajar.

Bab ketiga, membahas tentang dari Islamisme menjadi pos-Islamisme: kesinambungan dan perubahan di Bulukumba. Pada bagian ini dipaparkan beberapa sub pembahasan. *Pertama*, permulaan Islamisasi di Bulukumba periode Datuk ri Tiro. *Kedua*, perkembangan Islam di Bulukumba: integrasi Islam dalam budaya lokal, tarekat, dan kemunculan Islam reformis. *Ketiga*, eksistensi Islam di

masa kolonial sampai kemerdekaan: perlawanan dan pembaruan Islam. *Keempat*, gerakan Islamisasi DI/TII di Bulukumba: merebut kekuasaan dan menegakkan Syariat Islam. *Kelima*, dari Orde Lama ke Orde Baru: aktivisme Islam politik, dan munculnya lembaga pendidikan Islam. *Keenam*, menguatnya wacana formalisasi Syariat Islam pada era reformasi di Bulukumba. *Ketujuh*, gerakan Islamisme dalam mengawal Syariat Islam di Bulukumba: eksistensi dan nasibnya kini. *Kedelapan*, pos-Islamisme dan ruang publik di Bulukumba.

Bab keempat, memaparkan tentang pos-Islamisme di Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah dan jaringan dakwahnya di Kabupaten Bulukumba. Pada bab ini, diuraikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu *pertama*, tentang Wahdah Islamiyah, dari Islamisme ke Pos-Islamisme dan Pengaruhnya pada Lembaga Pendidikan Islam. *Kedua*, Jaringan Dakwah Wahdah Islamiyah dalam Aktivitas Belajar Keislaman Rohis di SMAN dan MAN di Kabupaten Bulukumba

Bab kelima, menguraikan tentang pos-Islamisme dalam budaya populer dan aktivitas belajar keislaman siswa di luar sekolah dan madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan, yakni *pertama*, fenomena bikers Muslim Bulukumba: representasi, pendidikan Islam, dan identitas keislaman. *Kedua*, aktivitas belajar Islam siswa SMA dan MAN Kabupaten Bulukumba di luar sekolah.

Di bab keenam, adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.